



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, dan lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 yang mengatur tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara agar membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dilaksanakan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk menifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, RSUD Prov. NTB sebagai organisasi perangkat daerah wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Prov. NTB Tahun 2017 dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna



mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Prov. NTB Tahun 2017 diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur dan seharusnya dicapai oleh RSUD Prov. NTB serta dapat mendorong RSUD Prov. NTB didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar, terutama dalam pelaksanaan program/kegiatan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. GAMBARAN UMUM

1. Sejarah RSUD Provinsi NTB

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut RSUD Prov. NTB berlokasi di Jalan Praburangkasari Dasan Cermen Mataram memiliki luas lahan 125.000 m² dan luas bangunan 57.206 m².

Gedung lama Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Jalan Pejanggik no. 6 Mataram didirikan ± tahun 1915 merupakan gedung peninggalan pemerintah Kolonial Belanda, terletak ditengah-tengah Kota Mataram dan dibangun di atas areal tanah seluas 2,5 ha dan merupakan gedung Sekolah Dasar (HIS). Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia, gedung tersebut tidak lagi dipergunakan sebagai tempat pendidikan, melainkan dipergunakan sebagai tempat Palang Merah. Beberapa waktu kemudian penggunaannya berubah sebagai Rumah Sakit (Rumah Sakit Beatrix). Antara tahun 1947-1948 nama Rumah Sakit Beatrix diubah menjadi Rumah Sakit Umum Mataram dan merupakan bagian dari Dinas Kesehatan Rakyat Lombok. Pada masa itu beberapa gedung dibangun untuk menambah/melengkapi gedung yang telah ada sesuai kebutuhan waktu itu.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 448/Pem.47/5/151 tanggal 5 Nopember 1969,



status Rumah Sakit Umum Mataram yang pengelolaannya di bawah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat diubah menjadi milik dan pengelolaannya dibawah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nomenklatur Rumah Sakit Umum Daerah Mataram. Pada awal tahun 2005 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 13/Menkes/SK/I/2005 tentang Peningkatan Kelas, terjadi perubahan status pada Rumah Sakit Umum Daerah Mataram dari Rumah Sakit Kelas B menjadi Rumah Sakit Kelas B Pendidikan. Pada tahun 2011 RSUD Provinsi NTB status pengelolaannya ditetapkan menjadi PPK-BLUD melalui Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 37 tahun 2011. Berdasarkan Perda No. 8 tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008 mengubah nomenklatur RSUD Mataram menjadi RSU Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perkembangan terakhir berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan ke dua atas Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomenklatur Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat berubah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Tugas RSUD Provinsi NTB:

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan melaksanakan upaya rujukan kesehatan serta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan, dan melaksanakan pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit Kelas B Pendidikan.



3. Fungsi RSUD Provinsi NTB

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, RSUD Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pelayanan medis
2. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis
3. Penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan
4. Penyelenggaraan pelayanan rujukan
5. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan
6. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan calon dokter dan tenaga kesehatan lainnya
7. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan

4. Kepegawaian

Salah satu unsur yang paling penting dalam organisasi adalah Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai yang akan menggerakkan dan melaksanakan tugas organisasi. Status pegawai yang ada di RSUD Provinsi NTB saat ini dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Distribusi SDM RSUD Provinsi NTB Menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin tahun 2017

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	345	515	860
2	Pegawai Tidak Tetap Daerah (PTTD)	3	2	5
3	Pegawai Non ASN	149	150	299
4	Dokter Paruh Waktu	14	10	24
5	Dokter Kontrak	2	6	8
Jumlah		513	683	1196

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian RSUD Prov NTB

Pegawai RSUD Provinsi NTB dalam melaksanakan tugas sehari-hari berpedoman pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sesuai dengan



jabatan/ kompetensi masing-masing. Jenis jabatan yang ada di RSUD Provinsi NTB, yaitu jabatan struktural (eselon), jabatan non struktural umum (administrasi) dan jabatan non struktural khusus (fungsional), dengan distribusi sebagai berikut :

Tabel 1.2 Distribusi PNS RSUD Provinsi NTB Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2017

No	Jenis Jabatan	Jenis Kelamin		Jml
		Laki-laki	Perempuan	
1	Struktural	18	10	28
2	Non Struktural			
	a. Non Struktural Umum	124	75	199
	b. Non Struktural Khusus/ Fungsional	203	430	633
J u m l a h		345	515	860

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian RSUD Prov NTB

Jenis Jabatan Fungsional yang ada di RSUD Provinsi NTB Tahun 2017 sebanyak 20 jenis jabatan fungsional (Jafung), yaitu :

- 1) Jabatan Fungsional Dokter
- 2) Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinik
- 3) Jabatan Fungsional Dokter Gigi
- 4) Jabatan Fungsional Perawat
- 5) Jabatan Fungsional Perawat Gigi
- 6) Jabatan Fungsional Tekhniker Gigi
- 7) Jabatan Fungsional Bidan
- 8) Jabatan Fungsional Apoteker
- 9) Jabatan Fungsional Asisten Apoteker
- 10) Jabatan Fungsional Perekam Medis
- 11) Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis
- 12) Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium
- 13) Jabatan Fungsional Radiografer
- 14) Jabatan Fungsional Terapis Wicara
- 15) Jabatan Fungsional Okupasi Terapi
- 16) Jabatan Fungsional Refraksionis
- 17) Jabatan Fungsional Fisioterapis
- 18) Jabatan Fungsional Nutritionis
- 19) Jabatan Fungsional Sanitarian
- 20) Jabatan Fungsional Umum



Dua puluh jenis jabatan fungsional (kecuali fungsional umum) tersebut masing-masing memiliki strata yang berbeda-beda.

Distribusi SDM Fungsional RSUD Provinsi NTB Tahun 2017 menurut jenis jabatan dan jenis kelamin dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1.3 Distribusi SDM Fungsional RSUD Provinsi NTB Tahun 2017

No	Jenis Jabatan fungsional	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Dokter Spesialis	28	20	48
2	Dokter Umum	14	29	43
3	Dokter Gigi	2	3	5
4	Paramedis keperawatan	107	275	382
5	Paramedis nonkeperawatan	52	103	155
Jumlah		203	430	633

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian RSUD Prov NTB

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit, bahwa kebutuhan dokter spesialis RS Tipe B sebanyak 56 orang, sementara dokter spesialis pemangku jabatan fungsional yang ada saat ini di RSUD Provinsi NTB sebanyak 48 orang. Adapun rincian jenis dan jumlah dokter spesialis pemangku sebagai berikut:

Tabel 1.4 Rincian Dokter Spesialis Pemangku Jabatan Fungsional di RSUD Provinsi NTB Tahun 2017

No	Nama Spesialisasi	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Spesialis Anak (DSA)	3	3	6
2	Spesialis Anestesi (DSAN)		4	4
3	Spesialis Bedah (DSB)	7		7
4	Spesialis Bedah Mulut (DSBM)		1	1
5	Spesialis Emergency (DSEm)		1	1
6	Spesialis Jantung (DSJ)		2	2
7	Spesialis Keterampilan Fisik dan Rehabilitasi (DSKFR)	1	1	2
8	Spesialis Forensik	1		1
9	Spesialis Kulit dan Kelamin (DSKK)	1	1	2
10	Spesialis Mata (DSM)	1	1	2



11	Spesialis Obgyn (DSOG)	4		4
12	Spesialis Otrhopedi (DSBO)	1		1
13	Spesialis Paru (DSP)	1	1	2
14	Spesialis Patologi Klinik (DSPK)		1	1
15	Spesialis Penyakit Dalam (DSPD)	4		4
16	Spesialis Radiologi (DSR)	1	1	2
17	Spesialis Syaraf (DSS)	1	1	2
18	Spesialis THT (DTHT)	2	1	3
19	Spesialis Urologi (DSU)	1		1
JUMLAH		28	20	48

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian RSUD Prov. NTB

Kekurangan Dokter Spesialis di RSUD Provinsi NTB telah diupayakan melalui pendidikan dokter umum ke jenjang dokter spesialis maupun dokter spesialis ke sub spesialis baik yang didanai oleh APBD Provinsi NTB, Universitas Mataram (Unram) maupun Kementerian Kesehatan. Namun, program pendidikan dokter umum ke jenjang dokter spesialis maupun ke jenjang dokter spesialis ke subspecialis yang didanai oleh APBD Provinsi NTB terkendala karena belum keluar SK Tugas Belajar dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan penundaan oleh Institusi Pendidikan terkait. Upaya lain yang telah dilakukan adalah dengan memberdayakan dokter-dokter spesialis Fakultas Kedokteran UNRAM sejalan RSUD Prov. NTB sebagai rumah sakit pengampu FK UNRAM. Dimana di dalam distribusi SDM RSUD Provinsi NTB di sebut sebagai dokter paruh waktu, Adapun rincian dokter paruh waktu RSUD Provinsi NTB Tahun 2017, sebagai berikut:

Tabel 1.5 Rincian Dokter Paruh Waktu RSUD Provinsi NTB Tahun 2017

No	Nama Spesialisasi	Jumlah		Total (Orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Spesialis Anak (DSA)		1	1
2	Spesialis Bedah Syaraf DSBS)	2		2
3	Spesialis Forensik (DSF)	1		1
4	Spesialis Jantung (DSJ)	1	1	2
5	Spesialis Kulit dan Kelamin (DSKK)	1		1
6	Spesialis Mata (DSM)		4	4



7	Spesialis Obgyn (DSOG)	1		1
8	Spesialis Paru (DSP)		1	1
9	Spesialis Penyakit Dalam (DSPD)	3	1	4
10	Spesialis Radiologi (DSR)		1	1
11	Spesialis Syaraf (DSS)		1	1
12	Spesialis THT (DTHT)	2		2
13	Spesialis Urologi (DSU)	2		2
JUMLAH		14	10	24

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian RSUD Prov. NTB

5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 41 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada lampiran 1.

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Peran RSUD Provinsi NTB dalam pembangunan daerah adalah mewujudkan derajat kesehatan masyarakat dengan melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu melalui upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan melaksanakan upaya rujukan kesehatan serta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan, serta melaksanakan pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit Kelas B Pendidikan baik di rawat jalan, rawat inap, maupun rawat darurat. Muara akhirnya adalah meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) masyarakat NTB sehingga mampu berdayasaing. Pelayanan yang diberikan di RSUD Provinsi NTB meliputi pelayanan medis spesialistik, pelayanan medis canggih, maupun pelayanan unggulan.



Berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap tugas pokok dan fungsi RSUD Provinsi NTB (masalah-masalah yang dihadapi secara internal) dan beberapa isu yang mengemuka antara lain:

1. Pelayanan RSUD Pemerintah belum optimal dan berdaya saing,
2. Pelayanan keperawatan RSU pemerintah belum sesuai standar.
3. Administrasi ketatausahaan belum tertib dan lancar.
4. Administrasi keuangan belum transparan dan akuntabel.
5. Rencana program kurang terarah dan terpadu.
6. Output Pendidikan dan Pelatihan belum sesuai harapan.
7. Output penelitian dan pengembangan belum sesuai kebutuhan.

Disamping itu terdapat juga beberapa isu-isu strategis yang merupakan isu-isu nasional, antara lain:

1. Pelayanan pasca Relokasi RS
2. Penerapan pasien Safety
3. Standar Akreditasi Baru RS
4. Optimalisasi Sumber Daya Siaga Bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB)
5. Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi
6. BPJS dan aksesibilitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin (SHI social Health Insurance)
7. Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas System Informasi Manajemen Rumah Sakit
8. Peningkatan Status RS menjadi Kelas A

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB terus berupaya melakukan perbaikan dan pengembangan baik fisik maupun peralatan untuk mewujudkan *customer satisfaction* melalui *medical excellence, service excellencedan finance excellence*. Upaya-upaya tersebut antara lain penambahan kapasitas Tempat Tidur menjadi 607 kapasitas tempat tidur, meningkatkan kompetensi petugas melalui pendidikan formal (dokter spesialis ke sub spesialis, dokter umum ke spesialis dll) maupun informal (diklat-diklat teknis) serta pengembangan pelayanan pusat pelayanan jantung dan pembuluh terpadu,



pusat pelayanan intervensi paru menjadi pelayanan unggulan di tahun 2017 serta menjadikan pelayanan radioterapi sebagai pelayanan unggulan di tahun 2018.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018 dituangkan kedalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Rumah Sakit Umum Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018 yang berisi penjabaran visi, misi dan program yang direncanakan dalam kurun waktu lima tahun yang selanjutnya telah direvisi pada bulan Agustus 2016 dan Oktober 2017. Reviuw Renstra tersebut berisi strategi pokok dalam penjabaran agenda pembangunan jangka menengah, serta acuan kerja bagi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB. Review Renstra tahun 2013 – 2018 dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan lima tahun kedepan.

1) VISI ,MISI, TUJUAN DAN SASARAN RSUD PROVINSI NTB

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factors*) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Reviuw Rencana Strategis RSUD Provinsi NTB adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra RSUD Provinsi NTB Tahun 2013-2018



VISI :Menjadi Rumah Sakit Rujukan yang Unggul dalam Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian di Indonesia Timur

MISI	TUJUAN	SASARAN
Pertama :Meningkatkan Kelancaran dan Ketepatan Pelayanan Kedokteran Yang Profesional Selaras Dengan Perkembangan Iptekdok	1. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan efektivitas pelayanan medis di IRI, IRJ, IRD, ICU, IBS, Anastesi, HD, Rehabilitasi Medik, dan Rekam Medis	1 Tersedianya gedung dan seluruh infrastruktur RSU Prov. NTB di Dasan Cermen sesuai standar RS Kelas A
		2 Tertata dan terkelolanya pelayanan medis rumah sakit secara efisien, safety, dan bermutu
		3 Terwujudnya layanan medis RS sesuai RS Pusat Rujukan (Kelas A)
		4 Tersedia dan terkelolanya SDM yang profesional, kompeten dan handal sesuai kebutuhan RS Kls A
		5 Tersedianya sarpras sesuai kebutuhan dan rencana pengembangan pelayanan medis sesuai standar RS Kelas A
		6 Terpeliharanya sarpras yanmed secara baik
		7 Terwujudnya layanan medis di masing-masing unit pelayanan ke dalam SIM RS secara integrated
	2. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan efektivitas pelayanan penunjang medis di Lab, Radiologi, Gizi, Farmasi, Forensik & Pemulasaraan Jenazah	1 Tertata dan terkelolanya pelayanan penunjang medis RS secara efisien, safety, dan bermutu
		2 Terwujudnya layanan penunjang medis RS sesuai RS Pusat Rujukan (Kelas A)
		3 Tersedia dan terkelolanya SDM layanan penunjang medis yang profesional, kompeten dan handal sesuai kebutuhan RS Kelas A
		4 Tersedianya sarpras sesuai kebutuhan dan rencana pengembangan pelayanan penunjang medis sesuai standar RS Kelas A
		5 Terpeliharanya sarpras penunjang medis
		6 Terwujudnya layanan penunjang medis di masing-masing unit ke dalam SIM RS secara integrated
	Kedua :Meningkatkan Kelancaran dan Kemudahan Pelayanan Asuhan Keperawatan Yang Komprehensif	1. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas pelayanan keperawatan
2 Tersedia dan terkelolanya SDM keperawatan yang profesional, kompeten dan handal sesuai kebutuhan RS Kelas A		
3 Tersedia, tertatadan terpeliharanya sarpras kerja keperawatan secara efisien dan efektif		
2. Meningkatkan kualitas rencana pengembangan perawatan		1 Terwujudnya layanan perawatan sesuai RS Pusat Rujukan (Kelas A)
		2 Terwujudnya administrasi dan manajemen keperawatan dalam melaksanakan praktik keperawatan professional



MISI	TUJUAN	SASARAN
		3 Tersedianya sarana dan prasarana kerja keperawatan yang memadai sesuai standar dan rencana pengembangan RS Kelas A
Ketiga :Mendorong Kelancaran dan Ketertiban AdministrasiKetausahaanYang Paripurna	1. Meningkatkan kualitas administrasi umum dan kepegawaian	1 Tertatanya adm. umum dan kepeg. secara tertib
		2 Tersedianya data dan formasi pegawai ke dalam SIM RS secara integrated
		3 Tersedia dan terkelolanya SDM adm. Umum dan kepegawaian yang professionaldan kompeten sesuai kebutuhan
		4 Tersedianya sarpras sesuai kebutuhan dan rencana pengembangan adm. Umum dan kepegawaian sesuai standar
		5 Terwujudnya lingkungan RS yang aman dan tertib
	2. Meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik negara/daerah	1 Tertatanya administrasi barang secara tertib
		2 Tersedia dan terkelolanya SDM pengelola barang yang profesional, kompeten dan handal sesuai kebutuhan
		3 Terwujudnya data aset di masing-masing unit ke dalam SIM RS secara integrated
		4 Tersedianya sarpras sesuai kebutuhan dan rencana pengembangan perlengkapan sesuai standar
	3. Meningkatkan sinergitas hubunganke Masyarakatan	1 Terjalinnnya hubungan kemasyarakatan yang harmonis
		2 Tersedia dan tertatanya sarana dan prasarana publikasi
		3 Tersedianya SDM kehumasan yang profesional dan kompeten
		4 Terwujudnya pengembangan layanan informasi, publikasi berbasis IT
	4. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan pemeliharaan dan penyehatan lingkungan	1 Terkelola dan terpeliharanya sarpras dan kebersihan lingkungan RS secara profesional
		2 Tersedia dan tertatanya sarana dan prasarana unit pemeliharaan sarpras dan penyehatan lingkungan RS sesuai standar
		3 Tersedianya SDM pemeliharaan sarpras dan penyehatan lingkungan (PSPL) yang profesional dan kompeten
		4 Terwujudnya pengembangan layanan PSPL yang handal
	5. Meningkatkan kualitas dan fungsi aplikasi SIMRS	1 Terwujud dan terkelolanya layanan SIMRS dengan seluruh unit dan kegiatan RS secara integrated
		2 Tersedia dan tertatanya sarana dan prasarana



MISI	TUJUAN	SASARAN
		Unit Sistem Informasi RS (SIRS) sesuai standar
		3 Tersedianya SDM Unit Sistem Informasi RS (SIRS) yang profesional dan kompeten
		6. Meningkatkan kualitas layanan sterilisasi dan binatu
		1 Tertata dan terkelolanya pelayanan non teknis sterilisasi dan binatu secara baik dan professional
		2 Tersedianya SDM sterilisasi dan binatu yang profesional, bersikap baik dan handal
		3 Tersedianya sarana prasarana kegiatan sterilisasi dan binatu sesuai kebutuhan
Keempat :Mengoptimal kan Kinerja Keuangan Yang Transparan dan Akuntabel	1. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas laporan keuangan	1 Tertata dan terkelolanya akuntabilitas keuangan rumah sakit secara profesional dan akuntabel
		2 Tersedia dan terkelolanya SDM yang profesional, kompeten dan handal sesuai kebutuhan
		3 Terintergrasinya seluruh kegiatan akuntabilitas keuangan ke dalam SIM RS secara integrated
		4 Tersedianya sarpras sesuai kebutuhan dan rencana pengembangan akutansi dan verifikasi
	2. Meningkatkan profesionalitas pengelolaan perbendaharaan dan mobilisasi dana	1 Tertata dan terkelolanya perbendaharaan dan mobilisasi keuangan rumah sakit secara profesional, efisien, dan transparan
		2 Tersedia dan terkelolanya SDM yang profesional, kompeten dan handal sesuai kebutuhan
		3 Terintergrasinya seluruh kegiatan perbendaharaan dan mobilisasi dana ke dalam SIM RS secara integrated
		4 Tersedianya sarpras sesuai kebutuhan dan rencana pengembangan perbendaharaan dan mobilisasi dana
	3. Meningkatkan efektivitas, efisiensi anggaran dan belanja	1 Tertata dan terkelolanya sistem penyusunan anggaran belanja rumah sakit secara baik dan sistimatis
		2 Tersedia dan terkelolanya SDM penyusunan anggaran belanja RS yang profesional, kompeten dan handal sesuai kebutuhan
		3 Terintergrasinya seluruh kegiatan penyusunan anggaran ke dalam SIM RS
		4 Tersedianya sarpras sesuai kebutuhan dan rencana pengembangan penyusunan anggaran
	4. Meningkatkan kualitas	1 Tertata dan terkelolanya pelayanan administrasi dan klaim pasien dengan jaminan



MISI	TUJUAN	SASARAN	
	<p>pelayanan administrasi dan klaim.</p>	<p>secara baik, transparan, tepat dan akurat</p> <p>2 Tersedia dan tertatanya SDM jaminan pelayanan klaim yang profesional, kompeten dan handal sesuai kebutuhan</p> <p>3 Tersedia dan terpeliharanya sarpras sesuai kebutuhan dan rencana pengembangan</p> <p>4 Terwujudnya layanan administrasi klaim pasien dengan jaminan ke dalam SIM RS secara transparan dan terpadu</p>	
<p>Kelima :Memantapkan Keterpaduan dan Keseimbangan Perencanaan Program</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas rencana program</p>	<p>1 Tertata dan tersusunnya Rencana Program RSUD Prov.NTB yang sesuai dengan kebutuhan dan rencana pengembangan</p> <p>2 Tersedianya SDM penyusunan program yang profesional, kompeten dan handal sesuai kebutuhan</p> <p>3 Terwujudnya rencana program dan kegiatan ke dalam SIM RS dan sistem elektronik lainnya secara terpadu</p> <p>4 Tersedianya sarana dan prasarana sub penyusunan program sesuai standar</p>	
	<p>2. Meningkatkan intensitas dan kontinuitas kerjasama antar lembaga.</p>	<p>1 Tertata dan terkelolanya pelayanan kerjasama rumah sakit dengan institusi lain secara profesional, efisien, dan transparan</p> <p>2 Tersedianya SDM hubungan antar lembaga yang profesional, kompeten dan handal sesuai kebutuhan</p> <p>3 Terwujudnya seluruh jenis dan ruang lingkup kegiatan MOU RS, kedalam SM-RS secara terpadu</p> <p>4 Tersedianya sumber daya, sarana dan prasarana sub hubungan antar lembaga sesuai standar</p>	
	<p>3. Meningkatkan kualitas laporan</p>	<p>1 Tertata dan terkelolanya hasil monev kegiatan rumah sakit secara profesional, akurat dan transparan</p> <p>2 Tersedianya SDM monev dan pelaporan yang profesional, kompeten dan handal sesuai kebutuhan</p> <p>3 Terwujudnya seluruh jenis data, hasil monev dan pelaporan kedalam SIM-RS secara terpadu</p> <p>4 Tersedianya sumber daya, sarana dan prasarana sub monev dan pelaporan sesuai standar</p>	
	<p>Keenam :Mengembangkan Ketersediaan,</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan</p>	<p>1 Tertata dan terkelolanya kegiatan pendidikan SDM di rumah sakit secara profesional</p> <p>2 Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan dan rencana pengembangan</p>



MISI	TUJUAN	SASARAN	
Kemampuan dan keterampilan Tenaga Medis/Non Medis		3 Tersedianya SDM unit pendidikan yang profesional, kompeten dan handal sesuai kebutuhan	
		4 Terwujudnya seluruh kegiatan pendidikan SDM RS dan praktek belajar mahasiswa/siswa kedalam SIM-RS secara terpadu	
	2. Meningkatkan kualitas pelayanan pelatihan	1 Tertata dan terkelolanya kegiatan pelatihan SDM di rumah sakit secara profesional	
		2 Tersedianya sarana dan prasarana pelatihan sesuai kebutuhan dan rencana pengembangan	
		3 Tersedianya SDM unit pelatihan yang profesional, kompeten dan handal sesuai kebutuhan	
		4 Terwujudnya seluruh kegiatan pelatihan SDM RS dan praktek belajar mahasiswa/siswa kedalam SIM-RS secara terpadu	
	Ketujuh :Meningkatkan Ketersediaan dan Keakuratan Data Hasil Penelitian	1. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan penelitian	1 Tertata dan terkelolanya kegiatan penelitian di rumah sakit secara profesional
			2 Tersedianya sarana dan prasarana penelitian sesuai kebutuhan dan rencana pengembangan
3 Tersedianya SDM unit penelitian yang profesional, kompeten dan handal sesuai kebutuhan			
4 Terwujudnya seluruh kegiatan penelitian kedalam SIM-RS secara terpadu			
2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pengembangan teknologi kesehatan		1 Tertata dan terkelolanya kegiatan pengembangan teknologi kesh di rumah sakit secara profesional	
		2 Tersedianya sarana dan prasarana pengembangan teknologi kesh sesuai kebutuhan dan rencana pengembangan	
		3 Tersedianya SDM unit pelatihan yang profesional, kompeten dan handal sesuai kebutuhan	
		4 Terwujudnya seluruh kegiatan pengembangan teknologi kesh kedalam SIM-RS secara terpadu	



B. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA RSUD PROV. NTB 2013-2018

Visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui berbagai strategi dengan menetapkan kebijakan dan selanjutnya dituangkan dalam program dan kegiatan yang selaras agar output maupun outcome sesuai dengan yang diharapkan.

1. Strategi

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta dengan mencermati isu-isu strategis RSUD Provinsi NTB, maka strategi RSUD Provinsi NTB yang tertuang dalam Rencana strategik Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi internal dan eksternal Rumah Sakit baik horizontal maupun vertikal
- b. Advokasi beberapa stakeholder untuk mendukung upaya pengembangan Rumah Sakit
- c. Sosialisasi kemajuan rumah sakit, pengembangan layanan dan berbagai kebijakan
- d. Konsolidasi dengan berbagai berbagai fasilitas kesehatan baik pemerintah maupun swasta
- e. Konsultasi formal/informal kepada lembaga terkait (kesehatan/non kesehatan)
- f. Edukasi formal dan informal kepada karyawan RS secara berkesinambungan
- g. Sinkronisasi berbagai kebijakan yang ditetapkan dari berbagai institusi atau lembaga baik Pusat maupun Daerah
- h. Identifikasi kebutuhan, rencana pengembangan, masalah/kendala, faktor-faktor pendukung dan penghambat, kekuatan atau kelemahan RS secara berkesinambungan
- i. Standarisasi pelayanan/Akreditasi RS
- j. Rasionalisasi Tarif Pelayanan Rumah Sakit



- k. Diversifikasi pelayanan & penunjang medis, pelayanan keperawatan, dan Pelayanan ketatausahaan

2. Kebijakan

Kebijakan yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh RSUD Provinsi NTB adalah sebagai berikut:

- a. Percepatan pembangunan/relokasi.
- b. Pengembangan manajemen mutu dan jenis pelayanan medis serta penunjang medis
- c. Perubahan status menjadi RS Kls A
- d. Peningkatan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
- e. Kerjasama dengan unit terkait
- f. Pembentukan tim teknis
- g. Penyesuaian tarif pelayanan
- h. Penyusunan / perubahan dokumen
- i. Perluasan jangkauan pelayanan
- j. Percepatan integrasi SIMRS
- k. Peningkatan pelaksanaan Dokter Paruh Waktu
- l. Rekrutmen pegawai non PNS
- m. Pengembangan manajemen mutu dan jenis pelayanan ketatausahaan
- n. Monev disiplin pegawai
- o. Penyediaan sarpras sesuai kebutuhan
- p. Bimbingan teknis
- q. Penyesuaian tarif pelayanan
- r. Pengembangan administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel
- s. Rekrutmen SDM Keuangan yang kompeten
- t. Pendampingan tenaga ahli
- u. Peningkatan mutu perencanaan dan pengembangan program
- v. Pemanfaatan aplikasi sistem perencanaan
- w. Percepatan integrasi SIMRS pengembangan manajemen mutu pelayanan Diklat.
- x. Kerjasama dengan unit terkait



3. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan serta memperhatikan posisi organisasi hasil analisis lingkungan, maka strategi dikembangkan dengan melaksanakan program dan kegiatan. Program yang ditetapkan oleh RSUD Provinsi NTB mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai Perda Nomor 2 tahun 2014 yang tertuang dalam Review Rencana Strategis (renstra). Adapun program-program tersebut adalah :

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- d. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- e. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- f. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- g. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
- h. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa//Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
- i. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata
- j. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

Sedangkan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh RSUD Prov. NTB tahun 2017 adalah :

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 3. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional



- c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - 1. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Formal
 - 2. Peningkatan mental dan fisik aparatur
- d) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 - 1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
- e) Program Pencegahan dan Penganggulangan Penyakit Menular
 - 1. Kegiatan peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (ide) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
- f) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
 - 1. Kegiatan Penyusunan Standart Pelayanan Kesehatan
- g) Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
 - 1. Pelayanan operasi bibir sumbing
 - 2. Pelayanan Sunatan masal
- h) Program Pengadaan; peningkatan sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata
 - 1. Kegiatan Pembangunan RS
 - 2. Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan RS
 - 3. Pengadaan obat-obatan
 - 4. Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah
 - 5. Kegiatan Pengadaan Mebeuleur RS
 - 6. Pengadaan perlengkapan Rumah Tangga
- i) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-Paru/RS Mata
 - 1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala RS
 - 2. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan RS
- j) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
 - 1. Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD



C. RENCANA KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA

Rencana Kinerja mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Barat sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2014 yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra SKPD), Rencana Kerja Tahunan (RKT), yang pada akhirnya di fokuskan pada Penetapan Kinerja (PK) yang memuat informasi tentang :

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan
2. Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis yang ingin dicapai
3. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang bersangkutan
4. Jumlah Anggaran yang mendukung program dan kegiatan

Penetapan Kinerja RSUD Provinsi NTB Tahun 2017 terdiri dari 4 sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tertata dan Terkelolanya kegiatan pendidikan dan pelatihan SDM rumah sakit secara professional	1) Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal SDM RS	6 org (dokter spesialis, dokter umum, dan ners spesialis), 874 org pelatihan SDM RS di unit
2	Tertata dan terkelolanya pelayanan medis rumah sakit secara efisien, safety, dan bermutu	2) Jumlah pasien masyarakat miskin/tidak mampu dan masalah social lainnya yang terlayani	500 orang
3	Tersedianya gedung dan seluruh infrastruktur, sarpras sesuai kebutuhan dan rencana pengembangan pelayanan dan penunjang medis sesuai standart RS Kelas A	3) Jumlah dan Jenis gedung serta infrastruktur sesuai standart RS (tipe A) 4) sarana prasarana sesuai standart RS (tipe A) 5) Alat-alat kedokteran/kesehatan sesuai standart RS A	1 unit 4 unit 2 paket
4	Tertata dan terkelolanya sumber daya RS	6) Jumlah pendapatan dan belanja operasional RS 7) Indeks Kepuasan Masyarakat	Rp.125.000.000.000 80%



Untuk lebih jelasnya Penetapan Kinerja RSUD Provinsi NTB Tahun 2017 dapat dilihat pada lampiran 2.

1. Tertata dan Terkelolanya kegiatan pendidikan dan Pelatihan SDM RS Secara Profesional.

Sebagai salah satu SKPD yang memberikan pelayanan public kepada masyarakat, RSUD Prov. NTB dituntut untuk selalu memberikan pelayanan prima. Pelayanan Prima salah satunya bisa dicapai apabila SDM yang ada berkualitas. Untuk menghasilkan SDM yang berkualitas diperlukan pendidikan dan atau pelatihan, baik secara formal maupun non formal secara terus menerus. Kegiatan ini ditujukan kepada pegawai/karyawan agar meningkatkan kesadaran karyawan/pegawai untuk dapat memahami dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku, mempunyai keahlian dan keterampilan dibidangnya masing-masing (teknis) sehingga mampu memberikan pelayanan secara efektif, efisien, dan safety.

2. Tertata dan terkelolanya pelayanan medis rumah sakit secara efisien, safety, dan bermutu.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan merupakan wujud kepedulian RSUD Prov. NTB pada masalah kesehatan. Setiap tahun jumlah kunjungan pasien ke RSUD Prov. NTB cenderung mengalami peningkatan, baik kunjungan rawat jalan, rawat inap, dan IGD. Pasien RSUD Prov. NTB salah satunya dari kalangan tidak mampu/miskin, melalui kegiatan ini RSUD Prov. NTB mempunyai kepedulian social untuk membantu pengobatan masyarakat yang miskin/tidak mampu ataupun masalah social lainnya.



3. Tersedianya gedung dan seluruh infrastruktur, sarpras sesuai kebutuhan dan rencana pengembangan pelayanan dan penunjang medis sesuai standart RS Kelas A.

Setiap tahun jumlah kunjungan pasien yang berobat ke RSUD Prov. NTB cenderung mengalami peningkatan dengan kasus penyakit bervariasi. Peningkatan jumlah kunjungan pasien serta kasus penyakit yang bervariasi menyebabkan kebutuhan akan ruang perawatan dan alat kesehatan RS juga meningkat. Pembangunan gedung RS pada tahun 2017 merupakan lanjutan terhadap pembangunan di tahun 2016 seperti:

- Pembangunan Gedung C (Guest House dan Diklat),
- Pengembangan Bunker Radioterapi RSUD Prov. NTB

Selain melanjutkan pembangunan di tahun 2017, RSUD Prov. NTB juga melakukan pengembangan pelayanan dengan membentuk ruang RICU, ruang PICU, pengembangan ruang kemoterapi menjadi 12 TT, ruang Burn Unit, pengembangan ruang tindakan rawat inap, stroke unit, poli TB-DOT, TB-MDR, penambahan ruang IBS, ruang pelayanan jantung terpadu (cathlab), CVU/ICCU, intermediate, bedah onkologi, ginekologi onkologi.

Untuk memenuhi kebutuhan alat-alat kesehatan RS, RSUD Prov. NTB mendapatkan dana DAK dan DBCHT. Untuk tahun 2017 RSUD Prov. NTB mendapatkan dana DAK sebesar Rp. 49.995.006.523,- yang dipergunakan untuk membeli CT Scan, Digital Radio Grafik System, Meja Operasi, Lampu periksa, Mikrobiology Analyzer, Paramount Bed, CPAP dan Radiant Warmer, Pasien Monitor, dll. Sedangkan dana DBCHT RSUD Prov. NTB mendapatkan dana sebesar Rp.30.000.000.000,- dan dana DAU Rp. 7.000.000.000,- yang dipergunakan untuk membeli alat dan kelengkapan radioterapi.

4. Tertata dan terkelolanya sumber daya RS

Sebagaimana dimaklumi salah satu agenda reformasi di bidang keuangan negara adalah dari penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja. Dengan berbasis kinerja ini, arah penggunaan dana pemerintah tidak lagi berorientasi pada input tetapi pada output. Pasal 68



dan pasal 69, UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas.

Sebagai tindak lanjut atas peraturan di atas, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang menjadi dasar dalam penerapan pengelolaan keuangan bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Berdasarkan hal di atas pada tahun 2011, RSUD Prov. NTB ditetapkan menjadi PPK-BLUD dimana penggunaan anggaran sangat fleksibel yang digunakan untuk kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD. Kegiatan tersebut antara lain digunakan untuk biaya operasional, biaya umum dan administrasi, dan biaya pengeluaran investasi.

Mengacu pada Review Renstra Rumah Sakit Umum Daerah provinsi NTB tahun 2013-2018, maka terjadi beberapa perubahan pada sasaran strategis dan indikator kinerja dalam penetapan kinerja RSUD Prov. NTB tahun 2017 (yang mengacu pada Renstra RSUD Prov. NTB sebelumnya), yaitu:

1. Tersedianya pelayanan medis yang berkualitas sesuai standart pelayanan minimal
2. Tersedianya pelayanan penunjang medis yang kualitas sesuai standart RS kelas A
3. Terwujud dan tertatanya pelayanan asuhan keperawatan di RS secara safety dan profesional
4. Tersedia dan terkelolanya SDM adm. umum dan kepegawaian yang profesional dan kompeten sesuai kebutuhan
5. Tertata dan terkelolanya akuntabilitas keuangan RS secara profesional yang terintegrasi denga SIM_RS
6. Tertata dan tersusunnya perencanaan dan pengembangan RS



7. Tersedianya SDM RS yang profesional, kompeten dan handal sesuai standart
8. Tertata dan terkelolanya kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi di RS secara profesional.

Sedangkan indikator kinerja dari sasaran strategis tersebut sesuai dalam review renstra sebagai berikut:

1. Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat
2. Persentase kepuasan pelanggan
3. Jumlah ketersediaan gedung dan seluruh infrastruktur sesuai standar RS kelas A
4. Persentase realisasi pengadaan alat-alat kesehatan/kedokteran
5. Waktu tunggu pelayanan resep obat jadi
6. Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah
7. Baku mutu limbah cair
8. Persentase kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat
9. Persentase kejadian infeksi nasokomial
10. Persentase kepuasan pelanggan
11. Persentase cost recovery
12. Jumlah masyarakat miskin yang terlayani
13. Persentase kelengkapan akuntabilitas kinerja
14. Jumlah SDM RS yang terdidik dan terlatih
15. Persentase pelatihan di unit khusus
16. Jumlah penelitian internal di RS



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 53 Tahun 2014 yang merupakan revidi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 29 Tahun 2010, kinerja RSUD Provinsi NTB diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja dari setiap pernyataan kinerja sasaran strategis yang telah diimplementasikan dalam program/kegiatan sesuai Rencana Kerja Tahunan. Pengukuran capaian kinerja RSUD Prov. NTB dilakukan berdasarkan pada realisasi pencapaian indikator dan target program kegiatanyang telah ditetapkan dalam Review Renstra 2013-2018, Renja 2017 dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) 2017.

Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat diukur berdasarkan pencapaian indikator kinerja Tahun 2017 dengan cara membandingkan antara capaian Tahun 2016 dengan indikator kinerja Tahun 2017 dan terhadap target akhir RPJMD.

Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis, Capaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB berdasarkan Sasaran Strategis di jelaskan sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja berdasarkan PK tahun 2017
 - a. Sasaran Strategis Tertata dan terkelolanya kegiatan pendidikan dan pelatihan SDM rumah sakit secara professional
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, setiap tahun Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi mengirimkan Pegawai untuk mengikuti pendidikan dan Pelatihan di berbagai disiplin ilmu terutama kesehatan yang di biayai dari APBD dan BLUD.



Pada tahun 2017 dokter yang mengikuti pendidikan antara lain: 2 orang dokter umum ke Spesialis dan 1 orang dokter spesialis ke sub spesialis yang di dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2017 dan 1 orang dokter umum ke spesialis menggunakan dana Depkes, sedangkan kegiatan pelatihan 476 orang (minimal 20 jam pelatihan) dan 840 orang (workshop, bimtek)

Keberhasilan pelaksanaan sasaran bertambahnya jumlah dokter spesialis dan sub spesialis di RSUD Prov. NTB dan meningkatnya kompetensi SDM Rumah Sakit

Table 3.1

Capaian Indikator Sasaran Tertata dan terkelolanya kegiatan pendidikan dan pelatihan SDM rumah sakit secara professional Tahun 2017

Indikator	Satuan	Realisasi 2016	2017		Capaian 2017 Terhadap (%)		Target 2018	Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Realisasi 2016	Target 2017		
1	2	3	4	5	$6 = (5-3) : 3 \times 100\%$	$7 = (5:4 \times 100\%)$	$8 = (5:9 \times 100\%)$	9
jumlah pendidikan dan pelatihan formal SDM RS	Orang (PPDS)	1	6	3	200	50	15	20
	Orang (pelatihan min 20 jam)	566	874	476	-16	54.5	54.09	880

Dari target tahun 2017 jumlah dokter yang akan melaksanakan pendidikan spesialis atau sub spesialis (PPDS) 6 orang, terealisasi 3 orang 2 orang dokter Umum ke Spesialis (PPDS I) dan 1 orang spesialis ke sub spesialis (PPDS II) atau 50% dari target karena sampai dengan akhir tahun 2017 3 orang dokter yang mengikuti tes akademik tidak lulus, sedangkan pelaksanaan pelatihan di RSUD Provinsi NTB Tahun 2017 terealisasi 476 orang (20 jam per kegiatan pelatihan) dari target 874 orang.



- b. Sasaran Strategis Tertata dan terkelolanya pelayanan medis rumah sakit secara efisien, safety dan bermutu

Sasaran Strategis Tertata dan terkelolanya pelayanan medis rumah sakit secara efisien, safety dan bermutu dengan indikator Jumlah pasien masyarakat miskin/tidak mampu dan masalah sosial lainnya pada tahun 2017 mencapai 585 orang dari target 500 orang atau 117% untuk lebih jelasnya dapat di lihat table berikut;

Tabel 3.2

Sasaran Strategis Tertata dan terkelolanya pelayanan medis rumah sakit secara efisien, safety dan bermutu

Indikator	Satuan	Realisasi 2016	2017		Capaian 2017 Terhadap (%)			Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Realisasi 2016	Target 2017	Target 2018	
1	2	3	4	5	$6 = \frac{(5-3):3}{5} \times 100\%$	$7 = \frac{7}{5:4 \times 100\%}$	$8 = \frac{5:9}{5} \times 100\%$	9
Jumlah pasien masyarakat miskin/tidak mampu dan masalah sosial lainnya yang terlayani	Orang	237	500	585	146.84	117	23.4	2500

- c. Sasaran Strategis " Tersedianya gedung dan seluruh infrastruktur, sarpras sesuai kebutuhan dan rencana pengembangan pelayanan dan penunjang medis sesuai standart RS kelas A"

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan penunjang pelayanan serta untuk mencapai target rumah sakit dari rumah sakit kelas B Pendidikan ke rumah sakit kelas A, rumah sakit harus mempunyai gedung dan seluruh infrastruktur, sarpras sesuai kebutuhan dan rencana pengembangan pelayanan dan penunjang medis sesuai standart RS kelas A



Tabel 3.3

Sasaran Strategis Tersedianya gedung dan seluruh infrastruktur, sarpras sesuai kebutuhan dan rencana pengembangan pelayanan dan penunjang medis sesuai standart RS kelas A

Indikator	Satuan	Realisasi 2016	2017		Capaian 2017 Terhadap (%)			Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Realisasi 2016	Target 2017	Target 2018	
1	2	3	4	5	$6 = (5-3) : 3 \times 100\%$	$7 = (5:4 \times 100\%)$	$8 = (5:9 \times 100\%)$	9
Jumlah dan jenis gedung serta infrastruktur sesuai standart RS (tipe A)	Unit	2	1	1	-50.00	100	3.4	29
Sarana dan prasarana sesuai standart RS (tipe A)	Jenis	2	4	4	100.00	100	100.0	4
Alat-alat kedokteran/ kesehatan sesuai standart RS tipe A (DAK dan DBHCHT)	Paket	2	2	2	0.00	100	100.0	2

Pada tahun 2017 capaian indikator Jumlah dan jenis gedung serta infrastruktur sesuai standart RS (tipe A) yaitu 1 unit atau 100% dari target Tahun 2017 sedangkan capaian indikator Sarana dan prasarana sesuai standart RS (tipe A) pada tahun 2017 tercapai 4 jenis atau 100% dari Target Tahun 2017 dan untuk indikator alat-alat kedokteran/kesehatan tercapai 100% (2 paket) dari target tahun 2017 yaitu 2 paket (161 unit)



d. Sasaran Strategis "Tertata dan terkelolanya sumber daya rumah sakit"

Sasaran strategis tertata dan terkelolanya sumber daya rumah sakit dengan indikator capaian kinerja jumlah pendapatan dan belanja operasional pada tahun 2017 tercapai 118,76 % yaitu Rp.148.455.607.541 dari target tahun 2017 Rp. 125.000.000.000,- sedangkan indikator indek kepuasan masyarakat pada tahun 2017 tercapai 81,6 % dari target 80% untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada table berikut;

Table 3.4

Sasaran Strategis Tertata dan terkelolanya sumber daya rumah sakit

Indikator	Satuan	Realisasi 2016	2017		Capaian 2017 Terhadap (%)		Target 2018	Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Realisasi 2016	Target 2017		
1	2	3	4	5	6=(5-3):3 x 100%	7=(5:4x100%)	8=(5:9) x100%)	9
Jumlah Pendapatan dan belanja operasional	Rp	115,075,520,437	125,000,000,000	148,455,607,541	29.01	118.764486	34.8	426,317,575,000
Indek Kepuasan Masyarakat	%	74.39	80	81.6	9.69	102	102.0	80

2. Capaian Indikator Kinerja Mendukung RPJMD

Dalam program RPJMD, RSUD Prov. NTB merupakan SKPD pendukung di dalam 31 indikator utama RPJMD 2013 – 2018. Adapun capaian indicator kinerja yang mendukung RPJMD dapat dilihat pada tabel :

Tabel 3.5 Capaian indikator Kinerja Mendukung RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja dalam RPJMD	Sat	Target RPJMD s.d Tahun 2018	Target tahun 2017	Realisasi Kinerja Tahun 2017	(%)
1	Tertata dan terkelolanya akuntabilitas	Tingkat kelancaran administrasi	%	100	100	93,69	93,69
			Rp	17.897.215.000	4.045.315.000	4.412.576.272	109,08



N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja dalam RPJMD	Sat	Target RPJMD s.d Tahun 2018	Target tahun 2017	Realisasi Kinerja Tahun 2017	(%)
	keuangan RS secara profesional yang terintegrasi dengan SIM-RS	perkantoran: - Persentase cost recovery					
2	Tersedia dan terkelolanya SDM adm. umum kepegawaian yang profesional dan kompeten sesuai kebutuhan	Tingkat kelancaran tugas aparatur; - Persentase kepuasan karyawan	%	100	100	100	100
			Rp	1.782.000.000	600.000.000	768.900.000	128,15
3	Tersedianya SDM RS yang profesional, kompeten dan handal sesuai standar	Tingkat kompetensi Aparatur - Jumlah SDM yang terlatih dan terdidik - % pelatihan di unit khusus	%	68	66	54,09 (jumlah SDM yang terlatih 476 org diluar workshop)	81,96
			Rp	7.300.950.000	2.080.475.000	1.158.171.452	55,67
4	Tertata dan terkelolanya akuntabilitas keuangan RS secara profesional yang terintegrasi dengan SIM-RS	Manajemen Aset	dok	1	1	0	0
			Rp	156.990.000	52.330.000	0	0
5	Tersedianya pelayanan medis RS secara efisien, safety dan bermutu	Cakupan Masyarakat Miskin Yang dilayani; - Jumlah masyarakat miskin yang terlayani	%	100	100	117 (585 orang dari target 500 org)	117
			Rp	32.009.826.000	6.000.000.000	4.414.675.320	73,58
6	Tersedianya pelayanan medis RS secara efisien,	Cakupan masyakat yang menderita penyakit menular yang	%	100	100	100	100
			Rp	427.151.000	100.000.000	131.128.707	131,13



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja dalam RPJMD	Sat	Target RPJMD s.d Tahun 2018	Target tahun 2017	Realisasi Kinerja Tahun 2017	(%)
	safety dan bermutu	dilayani					
7	Tersedianya pelayanan medis yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan minimal	Tingkat kepuasan pelayanan pasien - Persentase kepuasan pelanggan $\geq 80\%$	%	83	80	81,4	101,8
			Rp	4.972.240.000	2.000.000.000	1.459.089.025	72,96
8	Tersedianya pelayanan medis RS secara efisien, safety dan bermutu	Cakupan masyarakat miskin yang terlayani - Jumlah masyarakat miskin yang terlayani	%	100	100	117	117
			Rp	1.840.000.000	920.000.000	4.414.675.320	479,9
9	Tersedianya pelayanan penunjang medis yang berkualitas sesuai standar kelas A	Tingkat kepuasan terhadap sarana dan prasarana - Jumlah ketersediaan gedung dan seluruh infrastruktur sesuai standar RS Kelas A - Persentase realisasi pengadaan alat-alat kesehatan / kedokteran	%	83	80	80	100
			Rp	519.973.192.000	59.073.000.000	94.360.710.043	159,7
10	Tersedianya pelayanan penunjang medis yang berkualitas sesuai standar kelas A	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan	%	80	75	80	106,7
			Rp	16.407.609.000	3.000.000.000	5.443.824.050	181,5



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja dalam RPJMD	Sat	Target RPJMD s.d Tahun 2018	Target tahun 2017	Realisasi Kinerja Tahun 2017	(%)
11	Tertata dan terkelolanya akuntabilitas keuangan RS secara profesional yang terintegrasi dengan SIM-RS	Pendapatan RS	%	100	100	105,24	105,24
			Rp	426.317.575.000	100.000.000.000	148.497.308.887	148,5

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi kinerja sasaran strategis terhadap capaian RPJMD 2013-2018 berkisar antara 81% sampai dengan 117%. Pada indikator kinerja jumlah masyarakat miskin yang terlayani, RSUD Prov. NTB telah memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin sebanyak 585 orang (117%) dari target 500 orang. Sedangkan pada indikator kinerja jumlah SDM yang terlatih dan terdidik, capaian kinerja 54,09% dari target 66%, data tersebut hanya data untuk jumlah pelatihan yang minimal 20 jam pelatihan diluar kegiatan workshop, bimbingan teknis, simposium, dll. Jumlah yang mengikuti workshop, bimtek, simposium, dll berjumlah 840 orang. Pada akhir tahun periode RPJMD diharapkan seluruh sasaran strategis dapat terealisasi 100% melalui program dan kegiatan yang selaras dan berkesinambungan.

3. Target dan realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017
Target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja (PK) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 dapat di lihat pada tabel berikut:



Tabel 3.6 Target dan realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja					Program/ Kegiatan	ANGGARAN										
		Uraian	Satuan	Target	Realisasi	%		APBD				APBN						
								MURNI (Rp)	APBD-P	Realisasi	Keu%	Fisik %	(Rp)	Realisasi	%	Fisik %		
1.	Tertata dan terkelolanya kegiatan pendidikan dan pelatihan SDM rumah sakit secara profesional	1	jumlah pendidikan dan pelatihan formal SDM RS	Orang	6 org (dokter spesialis, dokter umum, dan ners spesialis)	3	50	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	2.060.475.000	2.060.475.000	1.535.148.213							
				Orang	874 orang (pelatihan SDM RS di unit)	476 orang (min 20 Jam pelatihan) 840 org (workshop, bimtek, simposiu)	54,46 96,11	Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal	1.980.000.000	1.980.000.000	1.454.709.813	73,47	73,47					
								Kegiatan Peningkatan mental dan Fisik Aparatur	80.475.000	80.475.000	80.438.400	99,95	100					
Jumlah Sasaran I								2.060.475.000	2.060.475.000	1.535.148.213								
2.	Tertata dan terkelolanya pelayanan medis rumah sakit secara efisien, safety dan bermutu	2	Jumlah pasien masyarakat miskin/tidak mampudan masalah sosial lainnya yang terlayani	Orang	500	585	117	Program Upaya kesehatan masyarakat	5.058.550.000	4.494.200.000	4.414.675.320							
								Kegiatan Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	5.058.550.000	4.494.200.000	4.414.675.320	98,23	98,23					
Jumlah Sasaran II								5.058.550.000	4.494.200.000	4.414.675.320								
3.	Tersedianya gedung dan seluruh infrastruktur, sarpras sesuai kebutuhan dan rencana pengembangan pelayanan dan penunjang medis sesuai standart RS kelas A	3	Jumlah dan jenis gedung serta infrastruktur sesuai standart RS (tipe A)	Unit	1	1	100	Program Pengadaan; peningkatan sarana dan prasara Rumah Sakit	96.761.207.000	96.987.333.523	94.360.710.043							
				unit	4	4	100	Kegiatan Pembangunan rumah sakit	5.237.380.000	5.237.380.000	5.026.240.950							



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja					Program/ Kegiatan	ANGGARAN								
		Uraian	Satuan	Target	Realisasi	%		APBD					APBN			
								MURNI (Rp)	APBD-P	Realisasi	Keu%	Fisik %	(Rp)	Realisasi	%	Fisik %
	5	Alat-alat kedokteran/kesehatan sesuai standart RS (tipe A)	Paket	2	2	100	Kegiatan pengadaan ambulance/mobil jenazah	1.653.940.000	1.653.240.000	1.311.395.363	79,32	100				
							Kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan RS	86.980.780.000	86.995.006.523	84.998.997.930	97,71	93,55				
							Kegiatan Pengadaan Obat-obatan	1.524.575.000	1.738.925.000	1.725.475.800	99,23	100				
							Kegiatan Pengadaan meubeler RS	508.500.000	506.750.000	500.000.000	98,67	98,44				
							Kegiatan Pengadaan rumah tangga RS	856.032.000	856.032.000	798.600.000	93,29	100				
							Program Pemeliharaan Sarpras RS/RSJ/RS Paru/RS Mata	5.591.150.000	5.675.650.000	5.465.270.050						
							Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala RS	4.074.150.000	4.162.150.000	3.985.133.400	95,23	100				
							Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan RS	1.517.000.000	1.513.500.000	1.480.136.650	97,80	100				
							Jumlah Sasaran III	102.352.357.000	102.662.983.523	99.825.980.093						



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja					Program/ Kegiatan	ANGGARAN									
		Uraian	Satuan	Target	Realisasi	%		APBD					APBN				
								MURNI (Rp)	APBD-P	Realisasi	Keu%	Fisik %	(Rp)	Realisasi	%	Fisik %	
4	Tertata dan terkelolanya sumber daya rumah sakit	4	jumlah pendapatan dan belanja operasional	Rp	125.000.000.000	148.455.607.541	118,76	Program Peningkatan mutu pelayanan BLUD	125.000.000.000	165.755.611.725	156.892.313.632						
		5	indeks kepuasan masyarakat	%	80	81,6	101,75	Kegiatan Pelayanan dan pendukung pelayanan	125.000.000.000	165.755.611.725	156.892.313.632	94,65	94,65				
Jumlah Sasaran IV								125.000.000.000	165.755.611.725	160.545.288.110							



4. Target dan Realisasi Kinerja Berdasarkan SPM tahun 2017

Tabel 3.7 Target dan Realisasi Kinerja tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	% pencapaian
1	Tersedianya Pelayanan Medis yang berkualitas sesuai dengan standart pelayanan minimal	1. Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat 2. Persentase kepuasan pelanggan $\geq 80\%$	1. ≤ 5 menit terlayani setelah pasien datang 2. $\geq 80\%$	1. 4,07 menit 2. 81,6%	1. 81,4% 2. 102%
2	Tersedianya pelayanan penunjang medis yang berkualitas sesuai standart RS kelas A	1. Jumlah ketersediaan gedung dan seluruh infrastruktur sesuai standart kelas A 2. Persentase realisasi pengadaan alat-alat kesehatan/kedokteran 3. Waktu tunggu pelayanan resep obat jadi 4. Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah 5. Baku mutu limbah cair 6. Persentase kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	1. 1 unit 2. 3 paket (100%) 3. ≤ 30 menit 4. 24 jam 5. BOD < 30 mg/l, COD < 80 mg/l, TSS < 30 mg/l 6. $\leq 80\%$	1. 1 unit 2. 3 paket 3. 27,21 menit 4. 24 jam 5. BOD 5,54mg/l COD 9,95mg/l TSS 41mg/l 6. 80%	1. 100% 2. 100% 3. 90,7% 4. 100% 5. 66,7% 6. 100%
3	Terwujud dan tertatanya pelayanan asuhan keperawatan di rumah sakit secara safety dan profesional	1. Persentase kejadian infeksi nasokomial	1. $\leq 1,5\%$	1. 0,14 %	90,67%



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	% pencapaian
4	Tersedia dan terkelolanya SDM administrasi umum dan kepegawaian yang profesional dan kompeten sesuai kebutuhan	1. Persentase kepuasan karyawan	≥80 %	76,32%	95,4%
5	Tertata dan terkelolanya akuntabilitas keuangan RS secara profesional yang terintegrasi dengan SIM-RS	1. Persentase cost recovery 2. Jumlah masyarakat miskin yang terlayani	1. ≥80% 2. 500 Orang	1. 92% 2. 585 orang	1. 115% 2. 117%
6	Tertata dan tersusunnya perencanaan dan pengembangan RS	1. Persentase kelengkapan akuntabilitas kinerja	100 %	100%	100%
7	Tersedianya SDM RS yang profesional, kompeten dan handal sesuai standar	1. Jumlah SDM yang terdidik dan terlatih 2. Persentase pelatihan di unit khusus	1. ≥60%	1. 54,46%	90,76%
8	Tertata dan terkelolanya kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi di rumah sakit secara profesional	1. Jumlah penelitian Internal di RS	7 jumlah penelitian	7 jumlah penelitian (dokumen)	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian realisasi kinerja yang mengacu pada delapan sasaran strategis. Adapun indikator kinerja RSUD Prov. NTB mengacu kepada SPM (Standard Pelayanan Minimal). Berdasarkan Kepmenkes No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standard Pelayanan Minimal dijelaskan bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu Rumah Sakit dituntut untuk



memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dari 16 Indikator kinerja 2 indikator kinerja belum tercapai yaitu indikator kinerja persentase kepuasan karyawan dan indikator kinerja jumlah SDM yang terlatih dan terdidik. Bila dirinci SDM di RSUD Prov. NTB yang mengikuti pelatihan minimal 20 jam pelatihan sebanyak 476 orang (54,46%) dan yang terpapar workshop, bimtek, simposium sebanyak 840 orang (96,11%). Dari tabel 3.3 dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja RSUD Prov. NTB sebesar 91,50%.

5. Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.8 Realisasi Kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Realisasi				
				2013	2014	2015	2016	2017
1	Tersedianya Pelayanan Medis yang berkualitas sesuai dengan standart pelayanan minimal	1. Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat	Menit	4	4	5	5	4,07
		2. Persentase kepuasan pelanggan $\geq 80\%$	%	71,09	73,89	74,39	74,53	81,6



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Realisasi				
				2013	2014	2015	2016	2017
2	Tersedianya pelayanan penunjang medis yang berkualitas sesuai standart RS kelas A	1. Jumlah ketersediaan gedung dan seluruh infrastruktur sesuai standart kelas A	Unit	100%	13 pkt	10 pkt	2 unit	1 unit
		2. Persentase realisasi pengadaan alat-alat kesehatan/keokteran	%	100	100	100	100	100
		3. Waktu tunggu pelayanan resep obat jadi	Menit	5,4	5,7	5,4	5,84	27,21
		4. Waktu pelayanan ambulance/ke retina jenazah	Jam	24	24	24	24	24
		5. Baku mutu limbah cair	Mg/l	BOD:14 COD:16 TSS:2	BOD:77,5 COD:175 TSS:22	BOD:18,4 COD: 34,7 TSS : 5,6	BOD:18,4 OD:34,7 TSS :5,6	BOD: 5,54 COD: 9,95 TSS: 41
		6. Persentase kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	%	100	100	100	100	100
3	Terwujud dan tertatanya pelayanan asuhan keperawatan di rumah sakit secara safety dan profesional	Persentase kejadian infeksi nasokomial	%	0,87	1,67	0,58	0,34	0,14



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Realisasi				
				2013	2014	2015	2016	2017
4	Tersedia dan terkelolanya SDM administrasi umum dan kepegawaian yang profesional dan kompeten sesuai kebutuhan	Persentase kepuasan karyawan	%	-	-	-	-	76,32
5	Tertata dan terkelolanya akuntabilitas keuangan RS secara profesional yang terintegrasi dengan SIM-RS	1. Persentase cost recovery	%	43,81	150	82,5	99,9	92,5
		2. Jumlah masyarakat miskin yang terlayani	Org	-	721	267	237	585
6	Tertata dan tersusunnya perencanaan dan pengembangan RS	1. Persentase kelengkapan akuntabilitas kinerja	%	100	100	100	100	100
7	Tersedianya SDM RS yang profesional, kompeten dan handal sesuai standar	1. Jumlah SDM yang terdidik dan terlatih	Org	110	85	451	565	476
		2. Persentase pelatihan di unit khusus	%	57,8	75	64	80	1,14
8	Tertata dan terkelolanya kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi di rumah sakit secara profesional	1. Jumlah penelitian Internal di RS	dok	-	-	-	2	5



RSUD Prov. NTB telah melakukan review renstra pada bulan September 2017. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja RSUD Prov. NTB mengalami perubahan. Bila dilihat dari tabel 3.4, capaian realisasi kinerja tahun 2017 dibandingkan dengan capaian 4 tahun sebelumnya ada beberapa indikator yang mengalami peningkatan diantaranya :

- Sasaran strategis (1), indikator kinerja no. 1 dan 2 capaian realisasi mengalami peningkatan. Indikator kinerja no. 1 menjadi 4,07 menit yang semula waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat 5 menit. Hal ini menunjukkan bahwa pasien yang datang ke layanan gawat darurat mendapatkan pelayanan dokter lebih cepat, rata-rata dalam waktu 4,07 menit sejak pasien tersebut datang. Hal ini tentu akan berdampak positif bagi pelayanan di RSUD Prov. NTB. Indikator kinerja no. 2 terkait dengan persentase kepuasan pelanggan, mengalami peningkatan dari 74,53% di tahun 2016 menjadi 81,6% di tahun 2017. Hal ini menunjukkan pelayanan di RSUD Prov NTB sudah baik (diatas target 80%).
- Sasaran Strategis (2), indikator kinerja no. 1 pembangunan gedung dan seluruh infrastruktur sesuai standart kelas A selama kurun waktu 5 tahun realisasi 100 %, kecuali pada tahun 2014 terealisasi 13 paket dari target 15 paket karena 2 paket pekerjaan pembangunan gedung RS mengalami putus kontrak yang dikarenakan kontraktor tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Indikator kinerja no. 3 waktu tunggu pelayanan resep obat jadi melambat dari tahun 2016 menjadi 27,21 menit, walaupun masih dalam rentang waktu normal di dalam SPM ≤ 30 menit. Kondisi ini disebabkan adanya peningkatan jumlah kunjungan pasien di RSUD Prov. NTB. Indikator kinerja no. 5 capaian baku mutu limbah cair mengalami peningkatan kualitas dalam proses pengolahan limbah cair sehingga sesuai dengan persyaratan lingkungan hidup.
- Sasaran strategis (3), indikator kinerja persentase kejadian infeksi nasokomial mengalami penurunan dari 0,34% ditahun 2016 menjadi



0,14% di tahun 2017. Hal ini bermakna bahwa pelayanan asuhan keperawatan di RSUD Prov. NTB sudah memenuhi standart dalam SPM (target $\leq 1,5\%$).

- Sasaran strategis (4), indikator kinerja persentase kepuasan karyawan tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena indikator ini hanya dilaksanakan ditahun 2017 dengan nilai 76,32%.
- Sasaran strategis (5), indikator kinerja no. 1 persentase cost recovery mengalami fluktuasi, hal ini disebabkan persentase cost recovery tergantung kepada jumlah pendapatan dan belanja operasional RS. Indikator kinerja no. 2 jumlah masyarakat miskin yang terlayani cenderung mengalami penurunan dari tahun 2014, hal ini disebabkan karena masyarakat NTB rata-rata sudah memiliki BPJS sebagai jaminan terhadap kesehatannya.
- Sasaran strategis (6), indikator kinerja persentase kelengkapan akuntabilitas kinerja selama kurun waktu 5 tahun tercapai 100%, ini berarti RSUD Prov. NTB selalu berusaha untuk tertib secara administrasi.
- Sasaran strategis (7), indikator kinerja no. 1 dan no. 2 cenderung mengalami penurunan hal ini disebabkan karena ketersediaan anggaran tidak mencukupi untuk kegiatan pelatihan.
- Sasaran strategis (8), indikator kinerja jumlah penelitian internal di RS kegiatannya baru dilaksanakan ditahun 2016 dan 2017. Namun untuk kegiatan penelitian eksternal di RSUD Prov. NTB sudah dilakukan sejak tahun 1985 sejak instalasi biomedik terbentuk yang sekarang menjadi instalasi litbangkes. Adapun jumlah penelitian internal di RSUD Prov. NTB ditahun 2017 meningkat sebanyak 60% (5 dok penelitian) dibandingkan tahun 2015 (2 dokumen penelitian).

Peningkatan terhadap beberapa indikator diatas tentunya tidak terlepas dari kerja keras semua bidang. Kenaikan realisasi ini akan berdampak positif terhadap capaian kinerja RSUD Prov. NTB. Harapan



kedepannya RSUD Prov. NTB semakin meningkat kinerjanya sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih prima kepada masyarakat.

6. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi.

Berdasarkan paparan hasil kinerja diatas dapat disimpulkan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan kinerja RSUD Provinsi NTB Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Adanya Kebijakan dan Program serta dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap pengembangan RS antara lain pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) yang dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan alat-alat kesehatan/kedokteran.
- b. Koordinasi antar bidang/unit/instalasi yang ada di RSUD Prov. NTB
- c. Adanya kerjasama dengan berbagai institusi/ lembaga
- d. Adanya Jaminan Kesehatan Nasional dan jaminan asuransi kesehatan lainnya yang mendukung pelayanan di RSUD Provinsi NTB.
- e. Sebagai RS Pusat Rujukan tertinggi di Provinsi NTB
- f. Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- g. Adanya komitmen Manajemen terhadap pengembangan pelayanan RS
- h. Tersedianya SDM RS yang cukup kompeten dan siap dalam memberikan pelayanan kesehatan serta pengembangan pelayanan RS

Adapun beberapa faktor yang menjadi kendala bagi capaian kinerja RSUD Provinsi NTB Tahun 2017 adalah:

- a. Anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk kegiatan pelatihan minimal 20 jam pelatihan bagi seluruh ASN di RSUD Prov. NTB.
- b. Dokumen yang terlambat masuk ke bagian ULP sehingga menghambat proses pengadaan.
- c. Berdasarkan analisa kebutuhan tenaga yang dilakukan oleh RSUD Prov. NTB dibandingkan dengan trend kenaikan jumlah kunjungan dan



pengembangan layanan, RSUD Prov. NTB kekurangan tenaga profesi kesehatan.

Upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut adalah:

- a. Koordinasi dengan profesi kesehatan terkait dalam pelaksanaan pelatihan fungsional.
- b. Melakukan koordinasi berkesinambungan dengan berbagai pihak melalui pertemuan *Show Cause Meeting* (SCM) antara berbagai pihak yang terkait (PPK, rekanan/kontraktor, pengawas/MK dan PTP)
- c. Melaksanakan rekrutmen pegawai non PNS..

Alternatif solusi untuk perbaikan kinerja kedepan adalah:

- a. Mengidentifikasi jenis pelatihan yang dibutuhkan oleh unit/instalasi/bidang untuk rencana kebutuhan pelatihan selama 5 tahun kedepan.
- b. Tetap berkoordinasi secara berkesinambungan dengan unit terkait untuk pengadaan.
- c. Melakukan evaluasi kinerja bagi seluruh karyawan di RSUD Prov. NTB

7. Efisiensi penggunaan sumber daya

- Efisiensi dari penggunaan anggaran tahun 2017 terutama dari nilai penggunaan anggaran belanja pengadaan barang jasa terdapat efisiensi dari penawaran nilai kontrak
- Memaksimalkan sumber daya manusia yang ada di bandingkan dengan obyek yang di layani
- Memaksimalkan fungsi alat-alat canggih yang tersedia di Rumah Sakit sehingga mengurangi beban kerja SDM



8. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja.

Semua program selalu berkontribusi terhadap keberhasilan kinerja di RSUD Prov. NTB. Namun ada beberapa program yang sangat menunjang dalam keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain:

a. program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Upaya Kesehatan masyarakat diperuntukkan untuk kegiatan pelayanan terhadap masyarakat miskin, tidak mampu/terlantar dan masalah sosial lainnya. Program dan kegiatan ini juga mendukung program yang terdapat di RPJMD.

b. Program pengadaan; peningkatan sarana prasarana RS/RSJ/RS paru/RS mata.

Alokasi anggaran kegiatan pengadaan alat kesehatan bersumber dari dana DAK, DBCHT dan DAU. Dengan adanya alokasi anggaran tersebut, RSUD Prov. NTB bisa mengadakan alat yang sesuai dengan kebutuhan ditahun yang berjalan, sehingga bisa menunjang pelayanan di RSUD Prov. NTB.

c. Program Peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD

Program ini sangat menunjang pelaksanaan program di RSUD Prov. NTB. Hal ini dikarenakan penggunaan anggaran sangat fleksibel yang digunakan untuk kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD. Ada beberapa kegiatan yang diakomodir dalam program ini antara lain untuk biaya operasional, biaya umum dan administrasi, dan biaya pengeluaran investasi.



B. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Berdasarkan PK Tahun 2017

Program/ Kegiatan	ANGGARAN				
	MURNI (Rp)	APBD-P	Realisasi	Keu %	Fisik %
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	2,060,475,000	2,060,475,000	1,535,148,213	74.50	74,50
pendidikan dan pelatihan formal	1,980,000,000	1,980,000,000	1,454,709,813	73.47	73,47
Peningkatan mental dan Fisik Aparatur	80,475,000	80,475,000	80,438,400	99.95	100
Program Upaya kesehatan masyarakat	5,058,550,000	4,494,200,000	4,414,675,320	98.23	98,23
Peningkatan pelayanan dan penanggula-ngan masalah kesehatan	5,058,550,000	4,494,200,000	4,414,675,320	98.23	98,23
Program Pengadaan; peningkatan sarana dan prasara Rumah Sakit	96,989,783,523	96,987,333,523	94,360,710,043	97.29	100
Pembangunan rumah sakit	5,237,380,000	5,237,380,000	5,026,240,950	95.97	100
pengadaan ambulance/mobil jenazah	1,653,940,000	1,653,240,000	1,311,395,363	79.32	100
Pengadaan alat-alat kesehatan RS	86,995,006,523	86,995,006,523	84,998,997,930	97.71	100
Pengadaan Obat-obatan	1,738,925,000	1,738,925,000	1,725,475,800	99.23	100
Pengadaan meubeler RS	508,500,000	506,750,000	500,000,000	98.67	98,44
Pengadaan rumah tangga RS	856,032,000	856,032,000	798,600,000	93.29	100
Program Pemeliharaan Sarpras RS/RSJ/RS Paru/RS Mata	5,591,150,000	5,675,650,000	5,465,270,050	96.29	100
Pemeliharaan rutin/berkala RS	4,074,150,000	4,162,150,000	3,985,133,400	95.75	100
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan RS	1,517,000,000	1,513,500,000	1,480,136,650	97.80	100
Program Peningkatan mutu pelayanan BLUD	125,000,000,000	165,755,611,725	152,170,437,704.31	91.80	91,80
Kegiatan Pelayanan dan pendukung pelayanan	125,000,000,000	165,755,611,725	152,170,437,704.31	91.80	91,80
Jumlah	234,699,958,523	274,973,270,248	257,946,241,330	93.81	



Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Berdasarkan DPATahun 2017

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	66.043.117.600	64.295.650.718	1.747.466.882	97,35
	A Gaji dan tunjangan	50.058.107.600	49.179.832.918	878.274.682	98,25
	B Tambahan penghasilan PNS	15.985.010.000	15.115.817.800	869.192.200	94,56
B	BELANJA LANGSUNG	284.616.486.556	265.440.298.884	19.176.187.671,59	93,26
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.781.438.400	4.413.669.322	1.367.769.078	76,34
	Perkantoran				
	A Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5.233.739.000	3.952.009.122	1.281.729.878	75,51
	B Penyediaan jasa administrasi keuangan	212.649.400	176.708.000	35.941.400	83,10
	C Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	100.000.000	98.100.000	1.900.000	98,10
	D Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	235.050.000	186.852.200	48.197.800	79,49
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	798.000.000	768.900.000	29.100.000	96,35
	a Pengadaan kendaraan dinas/operasional	798.000.000	768.900.000	29.100.000	96,35
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.060.475.000	1.535.148.213	525.326.787	74,50
	a Pendidikan dan pelatihan formal	1.980.000.000	1.454.709.813	525.290.187	73,47
	b Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	80.475.000	80.438.400	36.600	99,95
4	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	4.494.200.000	4.414.675.320	79.524.680	98,23
	a Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	4.494.200.000	4.414.675.320	79.524.680	98,23
6	Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular	179.320.000	152.114.707	27.205.293	84,83
	a Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit	179.320.000	152.114.707	27.205.293	84,83
7	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	2.124.457.908	1.578.219.025	546.238.883	74,29
	a Penyusunan standar pelayanan kesehatan	2.124.457.908	1.578.219.025	546.238.883	74,29
8	Program Pelayanan Penduduk Miskin	760.000.000	581.154.500	178.845.500	76,46
	a Pelayanan Operasi Bibir Sumbing	160.000.000	39.154.500	120.845.500	24,47
	b Pelayana Sunatan Massal	600.000.000	542.000.000	58.000.000	90,33
9	Program Pengadaan; peningkatan sarpras RS/RSJ/RS Paru/RS Mata	96.987.333.523	94.360.710.043	2.626.623.479	97,29
	a Pembangunan Rumah Sakit	5.237.380.000	5.026.240.950,10	211.139.049	95,97
	b Pengadaan Alat-alat Kesehatan RS	86.995.006.523	84.998.997.930	1.996.008.593	97,71
	c Pengadaan Obat-obatan RS	1.738.925.000	1.725.475.000	13.449.200	99,23
	d Pengadaan ambulance/mobil jenazah	1.653.240.000	1.311.395.363	341.844.637	79,32
	e Pengadaan mebeleur RS	506.750.000	500.000.000	6.750.000	98,67
	f Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit	856.032.000	798.600.000	57.432.000	93,29
10	Program pemeliharaan Sarpras RS/RSJ/RS Paru/RS Mata	5.675.650.000	5.465.270.050	210.379.950	96,29
	a Pemeliharaan Rutin/Berkala RS	4.162.150.000	3.985.133.400	177.016.600	95,75
	b Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan RS	1.513.500.000	1.480.136.650	33.363.350	97,80
11	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	165.755.611.725	152.170.437.704,31	13.585.174.020,69	91,80
	a Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	165.755.611.725	152.170.437.704,31	13.585.174.020,69	91,80
	TOTAL SKPD	350.659.604.156	329.735.949.602,41	20.923.654.553,59	94,03



Program Pelayanan Administrasi Perkantoran realisasi sebesar 76,34% dari target 100%. Untuk kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik terjadi peningkatan pagu anggaran sebesar 5% yang semula Rp. 4.970.319.000 menjadi Rp. 5.233.739.000,- (APDB perubahan). Peningkatan pagu anggaran di karena pada triwulan IV tahun 2017 direncanakan radioteraphy akan beroperasi. Namun karena alat yang dibutuhkan untuk radioteraphy baru tiba Bulan Oktober 2017, sehinggalayanan radioteraphy belum bisa beroperasi dan direncanakan pada tahun 2018 akan beroperasi. Dari kegiatan ini, dana tidak terserap sebesar Rp. 1.281.729.878,-.

Realisasi program peningkatan sarana dan prasarana aparatur melalui kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional tercapai 96,35% (keu) dan fisik (100%).

Realisasi program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan formal 73,47% dari target 100%, hal ini karena jumlah SDM yang ditargetkan melanjutkan tugas belajar dari 6 orang (dokter umum ke dokter spesialis, dokter spesialis ke sub spesialis, ners spesialis) hanya 3 orang dokter (50%) memenuhi syarat administrasi untuk dibayarkan pemberian bantuan tugas belajar sesuai dengan penerbitan SK dari BKD, sedangkan untuk kegiatan pelatihan minimal 20 jam terealisasi 476 orang dari target 880 (54,09%) (diluar workshoop, simposium, bimtek). Sisa anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 525.290.187,-. Sedangkan kegiatan peningkatan mental dan fisik aparatur terealisasi 99,95% dari target 100%.

Realisasi program Upaya Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 98,23% (keuangan). RSUD Prov. NTB tahun 2017 melalui kegiatan ini telah memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin/tidak mampu, masalah sosial lainnya sebesar 585 orang dari target 500 orang.

Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, realisasi kegiatan peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (ide)



pencegahan dan pemberantasan penyakit sebesar 84,84%. Sisa anggaran sebesar Rp. 27.205.293,-. Program peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit diperuntukkan bagi penderita HIV-AIDS. Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang program ini antara lain : pelatihan bagi konselor HIV-AIDS, pemeriksaan lab viral-load, pemeriksaan CD4, dan pemberian nutrisi bagi penderita ODHA.

Program standarisasi pelayanan keperawatan melalui kegiatan penyusunan standart pelayanan kesehatan terealisasi 74,29%. Kegiatan ini di lakukan untuk pemenuhan kegiatan akreditasi RS.

Realisasi program pelayanan penduduk miskin melalui kegiatan pelayanan operasi bibir sumbing sebesar 24,47% dari target 100%. Adapun jumlah orang yang dilayani sebanyak 10 orang dari target 40 orang. Rendahnya realisasi dikarenakan pada saat pelaksanaan kegiatan banyak dijumpai kelainan sampai pada langit-langit mulut (palato), sementara kegiatan operasi bibir sumbing di tahun 2017 ini diperuntukkan hanya untuk operasi kelainan di bagian bibir (labio) saja. Sedangkan realisasi kegiatan sunatan massal sebesar 90,33% (keu). Adapun jumlah orang yang dilayani dengan sunatan massal sebanyak 800 orang dari target 400 orang.

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS realisasi sebesar 97,29%. Kegiatan yang dilakukan antara lain: pembangunan RS, pengadaan alat-alat kesehatan RS, pengadaan obat-obatan RS, pengadaan mebeluer RS, pengadaan mobil ambulance/jenazah, pengadaan perlengkapan rumah tangga RS. Program pengadaan, peningkatan sarpras RS efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.626.623.479,-.

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit realisasi sebesar 96,29% dari target 100%. Kegiatan ini dipergunakan untuk pemeliharaan gedungRS dan pemeliharaan alat-alat kesehatan/kalibrasi.

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD realisasi belanja sebesar 94,65% dari target 100%. Adapun realisasi pendapatan BLUD tahun 2017 sebesar Rp.148.497.308.887 (105,28%). Kegiatan yang dilakukan pada program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD



antara lain digunakan untuk biaya operasional (biaya pelayanan, biaya umum dan administrasi), dan biaya pengeluaran investasi.



BAB IV PENUTUP

Berdasarkan tinjauan terhadap dokumen penetapan kinerja, maka dapat diinterpretasikan keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan RSUD Provinsi NTB serta perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan dalam mewujudkan visi serta misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategik.

Analisis secara komprehensif terhadap pelaksanaan kegiatan RSUD Provinsi NTB pada Tahun 2017 bila dilihat dari % realisasi fisik dapat disimpulkan berhasil karena semua program dan kegiatan hampir dapat terlaksana 100% , walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan yang merupakan kendala/hambatan. Kondisi ini dapat dilihat dari rata-rata persentase realisasi keuangan dari seluruh program dan kegiatan telah tercapai sebesar 95,39% dan realisasi fisik sebesar 99,42%. Program dan kegiatan yang dilaksanakan telah mendukung sasaran strategis baik pada RPJMD maupun didalam renstra.

Direktur RSUD Provinsi NTB,

dr. H. L. HAMZI FIKRI, MM
Pembina TK I/IV.b
NIP. 197406212002121007